

KEBIJAKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Oleh :

Mia Aidilla¹

(miaaidila94@gmail.com)

Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP MA

Bibliografi : 15 Buku, 4 Jurnal, 5 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

ASEAN Economic Community (AEC) 2015 has become part of the international system. ASEAN Economic Community was formed to create a single market and production is characterized by a free flow of goods, services, investment, skilled labor and freer movement of capital. The problem occurs that foreign investments are rare and not much to invest in Indonesia, so the discussion is needed about the Indonesia government policies issued by foreign investment or the so-called FDI (Foreign direct investment).

The purpose of this study is to describe and explain Indonesia make foreign investment policy. This study also aims to see Indonesia to prepare for the MEA (Masyarakat Economic ASEAN).

This study uses the theory of liberalism, the methods used, explanatory research method that seeks or intends to disclose and explain the phenomenon in detail and useful, in assessing the problems occurred. The development of foreign investment in Indonesia has not grown overall despite some initial potential which is available for viewing and favored investors, particularly in agriculture and mining.

The role of direct investments to areas of Indonesia. Foreign investment policy is to establish a technical institute that addresses foreign investment, promoting potential. Obstacles in attracting foreign investment in Indonesia is still slightly completeness and investment regulations that do not exist.

Key Word : ASEAN Economic Community 2015, theory of policy, implementation, foreign investment, local regulation.

¹ Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2011

PENDAHULUAN

ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) telah menjadi bagian dari sistem internasional. Banyak hal seperti tantangan, hambatan dan harapan dalam perjalanan organisasi kawasan ini menjadi satu masalah yang mengerucut sehingga kemudian muncul keinginan untuk berintegrasi.

Sebuah perjalanan panjang yang telah ditempuh atas kerjasama regional ASEAN telah menemukan bentuk yang lebih riil lagi. Sepuluh negara ASEAN berusaha dalam membentuk identitas tunggal kawasan, meskipun perbedaan budaya masing-masing anggota masih membayangi perjalanan ini. Dengan ditandatanganinya piagam ASEAN dan blue print ASEAN menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007 silam yang juga bertepatan dengan ulang tahunnya ke-40. ASEAN telah melalui proses transformasi, yang dulunya hanya sebatas kumpulan negara yang berbicara tentang politik guna mencapai kedamaian dan keamanan di Asia Tenggara mengarah kepada komunitas kawasan yang lebih terintegrasi. Cita-cita integrasi ASEAN kini lebih jelas setelah para kepala negara menetapkan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang tercantum dalam Bali Concord II yang didasarkan atas tiga pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN/AEC (*ASEAN Community*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC (*ASEAN Socio-Cultural Community*)). Dalam

perjalanannya, MEA adalah tujuan akhir dari keinginan berintegrasi di Asia Tenggara.

ASEAN Charter, salah satunya berisikan tentang integrasi ekonomi. Pada umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Negara-negara yang tergabung dalam suatu ikatan kerjasama. Mengintegrasikan ekonomi dalam rangka menciptakan sebuah area ekonomi yang kuat dibutuhkan komitmen yang lebih besar dari negara anggota dalam rangka menciptakan sebuah area ekonomi yang kuat.

Gagasan mengenai Liberalisasi ekonomi yang terbuka diperkenalkan oleh ahli ekonomi neoklasik David Ricardo dan Adam Smith dengan teori “keunggulan komparatif”. Dilaksanakannya prinsip keunggulan komparatif memastikan sebuah negara pada akhirnya akan meraih efisiensi ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar lewat partisipasi perdagangan luar negeri, bukannya lewat proteksi perdagangan. FDI (*Foreign direct investment*) merupakan salah satu bentuk investasi yang terjadi di zaman liberal ini.²

Dalam prakteknya sekarang ini dalam menarik FDI menanamkan modalnya kebijakan dilakukan sangat-sangat liberal dan memberikan semuanya kepada mekanisme pasar seperti:

² Robert Gilpin dan Millis Jean Gilpin, *Tantangan kapitalisme Global*, Dikutip dalam Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme baru, Peran negara dalam pembangunan*, (Yogyakarta: Tajidu Press, 2005), hal. 85.

1. Pemerintah Indonesia mengadakan Internasional Infrastructure Summit pada tanggal 17 Januari 2005 dan Bumh Summit pada tanggal 25-26 Januari 2005. Infrastructure summit menghasilkan keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastuktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian. Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut BUMN akan dijual pada sektor privat.³
2. Pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang antara lain memuat mengenai: Jangka waktu yang lebih lama pada hak guna tanah: dalam Undang-Undang yang baru, maksimum hak guna untuk pengolahan tanah, hak guna bangunan dan penggunaan tanah diperpanjang, dari 35, 30 dan 25 menjadi 95, 80, dan 75 tahun, Ketentuan perlakuan secara nasional: Undang-Undang tersebut memberikan dasar yang merata untuk perlakuan yang sama antara

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing,⁴

Melihat kebijakan yang dilakukan oleh negara kita konsepnya menyerahkan semua kepada mekanisme pasar seperti konsep yang diterapkan oleh negara Singapura. Namun hasilnya yaitu negara kita tidak dapat menarik banyak investasi asing ke negara kita. "Indonesia hanya berada pada posisi 135 sebagai negara yang menjadi tujuan investor dunia dari 175 negara yang disurvei,"⁵.

Hal itu disebabkan karena ketidak tegasan pemerintah dalam menentukan arah investasi perdagangan di Indonesia seperti sekarang ini. Sistem yang sangat liberal ternyata tidak juga mendatangkan investasi asing yang besar. Kebijakan penanaman modal asing yang sangat liberal ini cenderung menyerahkan semua kepada pasar sehingga apabila terjadi persaingan akibat dari globalisasi misalnya perusahaan modal asing yang telah mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak Indonesia mendapat saingan yang kuat dari perusahaan lain untuk mencapai penjualan terhadap konsumen dipasar global tentu akan membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam menjalin networking dengan konsumen dinegara lain jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa koridor yang jelas. Singkatnya sistem investasi dan perdagangan indonesia yang sangat liberal tidak bisa menjamin penanaman modal asing di

³ Mohtar Mas'oed, *Memahami Investasi Langsung Luar Negeri*, Handout kuliah Investasi dan Perdagangan, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana FISIPOL HII UGM, 2007).

⁴ Penulis mengutip beberapa point dari Dionisius Nardjoko, *Undang-undang penanaman Modal baru*, sumber: <http://www.fe.ui.ac.id/~patunru/globalisasi.PDF>., hal 3.

⁵ Nasril bahar, *Pemda Harus Benahi Iklim Investasi Daerah*. Sumber: <http://www.nasrilbahar.wordpress.com/page/2/-63k>

Indonesia akan merasa aman menanamkan modalnya. Selain itu berdasarkan data mengenai perlindungan bisnis di Indonesia yang dikeluarkan dari World Economic Forum (2007) yang berpusat di Geneva (Swiss) untuk *The Global Competitiveness Report 2007-2008* menunjukkan bahwa dari 131 negara yang masuk dalam sampel penelitiannya, Indonesia berada pada peringkat ke 93 untuk pertanyaan apakah pengusaha (*responden*) bisa mengandalkan pelayanan dari polisi untuk melindungi usahanya dari kriminalitas⁶

Disamping itu pula dampak dari sistem yang hiper-liberalis sangat rentan terhadap pelarian modal asing keluar negeri diakibatkan tidak jelasnya peranan pemerintah dalam memanfaatkan aset bangsa. Kondisi dari sistem yang hiper-liberalis tadi menyebabkan keuntungan besar akan diperoleh oleh penanam modal asing.

Sejarah dan Pengertian Kebijakan Investasi Asing di Indonesia

Dunia investasi yang terus berkembang hingga saat ini adalah kelanjutan dan bagian luhur dari tekad bangsa Indonesia untuk memajukan perekonomian yang disalurkan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang di dalamnya terdapat sebuah langkah tegas dan tepat yakni penanaman modal. Hal yang mana sedari dulu telah banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju bahkan sangat berpengaruh pada saat ini bagi

perekonomian global. Saat dicetuskan, dalam hal ini pemerintah sadar bahwa penanaman modal merupakan bagian integral dari pemulihan serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Hal inilah yang turut membangun persektif sejarah negara ini sebagai salah satu negara berkembang yang besar yang ada di Asia. Dengan melihat kembali sejarah perjalanan bangsa ini, tampak bahwa pada setiap kurun waktu kinerja ekonomi Indonesia semakin diorientasikan untuk menanggapi pengaruh luar dan mengikuti perkembangan Investasi asing yang masuk dan berdampak bagi perekonomian Indonesia.⁷

Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia khususnya negara-negara maju, keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia belumlah seberapa lama. Penanaman modal di Indonesia di kenal pertama kali melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan modalnya untuk usaha-usaha dalam bidang perkebunan.

Sejarah perkembangan penanaman modal di Indonesia dimulai pada abad XVI, tepatnya tahun 1511 ketika bangsa Eropa mulai menjejakkan kakinya di bumi Indonesia. Penanaman modal di Indonesia dibagi menjadi 4 kurun waktu berikut.

- a. Masa penguasaan atau penjajahan Belanda (1511-1942)
- b. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

⁶ Tulus Tambunan, *Daya Saing Indonesia Dalam Menarik Investasi Asing*, (dipaparkan pada seminar Bank Indonesia, 2007) sumber: <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KA-DIN-98-2495-06022008.pdf>, hal. 13.

⁷ Dhanisiwara K. harjono hukum penanaman modal.(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007),hal, 17

c. Masa Revolusi sampai Orde Baru (1945-1998)

d. Masa Reformasi (1998 – sampai sekarang)

- Masing-masing akan ditinjau secara singkat sebagai berikut :

a. Masa penguasaan atau penjajahan Belanda (1511-1945)

Misi perdangan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1596. Pada tanggal didirikan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, oleh karena itu VOC memiliki otoritas ganda baik sebagai business enterprise maupun sebagai pemegang kekuasaan berdaulat, yaitu dengan memaksakan tidak hanya monopoli rempah-rempah dan juga penyerahan secara paksa dengan menggunakan senjata.

Tahun 1641, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Coen memperkenalkan suatu Undang-undang (code) yang disebut Statuten van Batavia yang merupakan suatu paket perundang-undangan yang mengatur tidak kurang dari 48 masalah termasuk didalamnya masalah tata laku bagi inspektor berbagai bisnis yang berlaku bagi golongan timur asing.

Pada akhir abad ke 17, Belanda berhasil menuntaskan tiga strategi kebijakan investasinya di Indonesia, yaitu :

- a. Menjamin monopoli di bidang perdagangan;
- b. Mengamankan wilayah-wilayah strategis di Indonesia;
- c. Memberi wewenang kepada Belanda untuk menetapkan dan menerapkan peraturan di

bidang investasi secara sepihak

Tahun 1704-1709 Belanda mulai memberlakukan tidak hanya hukum Belanda tetapi juga ketentuan Hukum Adat. Dengan kebijakan tersebut monopoli dan pengaturan produksi, bangsa Indonesia memperoleh kesan, monopoli diasosiasikan dengan modal asing, dan monopoli diasosiasikan dengan kemiskinan struktural bagi penduduk lokal.

Dari perkembangan kegiatan VOC, tampaknya VOC telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip usaha dan sebaliknya lebih menggunakan pendekatan kekuasaan militer dalam menegakkan aturan yang menjamin keuntungan yang besar. Kebobrokan dan korupsi yang merajalela membuat VOC mengalami kemunduran dan kebangkrutan dan tahun 1799 VOC dibubarkan.

Kebijakan Investasi Asing Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY- JK) = (2004-2009) Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak,

dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah

Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu,

birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.

Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.

Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.

Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025

dengan pendapatan perkapita antara USS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Investasi Asing

Sebuah kebijakan dengan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Iklim investasi mengacu kepada konstelasi kebijakan di lingkungan suatu yuridiksi tertentu yang merupakan kepentingan utama dari orang-orang yang menguasai modal. Iklim investasi selalu mempunyai arti penting untuk menentukan tingkat investasi, tetapi iklim itu menjadi semakin menonjol ketika mobilisasi umum dari modal meluas secara khusus, ketika para pengendali modal yang berpangkalan disuatu yuridiksi tertentu menjadi mampu untuk menjelajahi kesempatan kondisi luar yuridiksitersebut. Sekalipun friksi-friksi yang berbeda mempunyai kepentingan pada kebijakan-kebijakan yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan. Beberapa kebijakan mendasar yang menjadi perhatian bersama bagi semua pengendali modal dan menjadi semakin penting ketika proses sebuah usaha dari seorang investor meningkat.

Kebijakan investasi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan seberapa para pelaku akan terkait dengan investasi, hal ini sesuai dengan keunggulan mereka untuk memperluas, bukan mempersempit jangkauan tempat tersedia bagi mereka. Suatu unsur terpenting dalam kemampuan seorang investor untuk meraih keuntungan besar adalah kehadiran dan daya saing para

investor dan perusahaan-perusahaan lain

Menciptakan iklim investasi yang menarik seluruh yuridiksi nasional terbukti secara teknis sangatlah sulit, karena banyaknya berbagai kepentingan yang harus diikutsertakan dan secara politis dan sosial bersifat destabilisasi. Biaya untuk membangun infrastruktur baik politis, hukum dan sarana prasarana pendukung yang diminta oleh investor sangat mahal, bila dilaksanakan secara umum diwilayah Negara. Ruang lingkup lokasi yang dapat dipilih oleh para pemilik modal sangat luas, sehingga posisi tawar-menawar mereka sangat kuat dan permintaan mereka untuk kebijakan responsive sangat luas.

Hal ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam memudahkan mereka dalam menanamkan modalnya di daerah.

Development yang tertuang dalam publikasinya di World Investment Report 2006, Indonesia tergolong sebagai Negara penerima FDI (Foreign Direct Investment) yang potensi maupun kinerjanya rendah (Under-Performan. Terkait dalam hal itu, sebagai daerah yang otonom yang baru, Indonesia, belum ada satu pun Perda yang mengatur bagaimana para investor yang akan menanamkan modalnya kedaerah tersebut. Pemerintah Indonesia dalam memberikan izin kepada investor, terutama PMA masih mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan surat Keputusan MENINVES/KBPKM Nomor:

38/SK/1999. Dan untuk melaksanakan hal tersebut.

Pemerintah Indonesia telah membentuk instansi yang menangani mengenai Penanaman Modal, yang temuat dalam Surat Keputusan (SK) Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata kerja, dan Perangkat Daerah Pemerintah Indonesia dalam dalam Pasal 190-192 adapun yang diatur Pasal tersebut adalah: (1) bidang perdagangan dan penanaman modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (2) Bidang perdagangan dan penanaman modal dibagi dalam dua seksi yaitu seksi perdangan dan seksi penanaman modal. (3) Adapun tugas-tugas seksi penanaman modal adalah :

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan penanaman modal
- b. pembinaan teknis dan penyelenggaraan penanaman modal
- c. pelayanan umum dan teknis penanaman modal
- d. pengelolaan perizinan usaha di bidang penanaman modal

Peluang dan Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

Sejak satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat dan menarik investasi asing serta bisa menyaingi Cina dan India. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara

menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Salah satu isu yang mengemuka terkait dengan implementasi MEA adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). SDM ini tidak hanya mereka yang bekerja di pemerintahan melainkan juga yang bergelut di dunia usaha, khususnya yang bekerja di sektor usaha kecil menengah (UKM) dan informal. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.

Menurut Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing. Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan sehingga MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang selama ini tertutup atau minim tenaga asingnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah lembaga atau asosiasi profesi telah banyak mempersiapkan diri dengan memperkuat kapasitas para anggotanya sehingga tenaga kerja ahli di Indonesia akan mampu bersaing. Sebagai contoh, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah banyak melakukan kerja sama dengan lembaga profesi sejenis di negara-negara ASEAN lainnya. Upaya ini bertujuan untuk menyetarakan berbagai program capacity building dan standar keahlian agar akuntan dari masing-masing negara memiliki

keahlian dengan persyaratan minimum yang sama. Dengan begitu, akuntan Indonesia bisa langsung *match* dengan kebutuhan profesi ketika bekerja di negara ASEAN lainnya. Demikian halnya dengan profesi bankir dan profesi di industri keuangan lainnya.

Peranan Investasi Asing Dalam Pembangunan di Indonesia

Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain yang ingin yang dicapai seperti pengembangan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

Peran yang dimainkan oleh modal asing dan bantuan luar negeri sangat menentukan dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan banyaknya industri-industri yang sangat terbangun oleh penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana dengan menggunakan bantuan luar negeri merupakan suatu keterkaitan yang tidak terbantahkan dengan masuknya modal asing lewat penanaman modal asing dan bantuan luar negeri diukur dari produk domestik bruto (PDB) serta peningkatan tabungan masyarakat memberikan bukti bahwa peranan yang dimainkan oleh penanaman modal asing maupun bantuan luar negeri.

Dari segi manfaatnya ada dua akibat utama dari penanaman modal

yang menguntungkan Indonesia. Pertama, pendapatan riil (seperti tercermin pada peningkatan tingkat upah bagi konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah). Kedua, adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti misalnya teknologi dan pengetahuan baru. Di lain pihak modal juga diharapkan peranannya dalam memperbesar devisa Indonesia lewat ekspor produksinya ke luar negeri, dalam kenyataan sudah terbukti banyaknya perusahaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang sudah mulai melaksanakan produksinya di Indonesia melalui kegiatan ekspor. Apalagi dengan kebijakan pemerintah lewat PP Nomor 24 Tahun 197 Tentang kegiatan penanaman modal di bidang perdagangan ekspor memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Mengefektifkan Investasi Asing.

Arus masuk penanaman modal atau investasi penting bagi pembangunan daerah. Investasi dibutuhkan untuk mendorong lebih besar daya produksi di daerah. Melalui modal yang ditanamkan oleh investor di daerah akan mendorong diversifikasi produksi dan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Implikasi lanjutan dari hal itu secara teoritis akan membuka banyak alternatif lapangan pekerjaan bagi investor, dari dalam dan luar negeri dengan menarik penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri dan kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan kurva pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Filosofi umum dari sifat investasi yang perlu digaris bawahi

oleh pemerintah daerah bahwa pertama, investasi akan selalu memperhitungkan aspek keuntungan yang maksimum dan tingkat resiko yang paling rendah, kedua, resiko yang minimum untuk tingkat keuntungan tertentu. Berdasarkan filosofi itu, pemerintah daerah dapat memformulasikan langkah-langkah strategis untuk mengundang datangnya modal mengidentifikasi terlebih dahulu aspek-aspek yang berpotensi menjadi kendala bagi perkembangan investasi.

Pelaksanaan otonomi daerah memberi banyak peluang bagi pemerintah daerah untuk menarik investor asing ke daerah. Adapun langkah-langka yang biasa dilakukan adalah menciptakan kondisi yang tertib dan aman, menjamin kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi prosedur perizinan, memberikan insentif bagi industri yang mampu bermitra bagi industri kecil dan menyerap tenaga kerja. Hal yang penting untuk segera dilakukan adalah melakukan segala persiapan berkaitan dengan penggalan dan mengidentifikasi potensi daerah, menyusun rencana dan strategi yang jelas sehingga tujuan dan sasaran pemerintah daerah untuk meningkatkan penanaman modal di daerah secara maksimal dapat tercapai. Adapun tahapan-tahapan yang dapat di upayakan pemerintah daerah (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) ke daerahnya adalah sebagai berikut:

1. Menggali dan mengidentifikasi untuk menentukan potensi unggulan daerah yang biasa ditawarkan pada investor sesuai kebijakan pemerintah daerah dan pengaturan hukum agi

investor. ran pendukung bagi kelancaran modal.

2. Melakukan promosi atau road show ataupun publikasi lain pada industri, terutama investor asing.
3. Menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan pengaturan hukum yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi investor.
4. Melakukan penyeyang tidak sesuai dengan ketentuan penanaman modal baik internasional ataupun nasional.
5. Mempersiapkan peningkatan sumber daya manusia aparat daerah dalam memberikan pelayanan yang baik.
6. Mendukung partisipasi aktif masyarakat atau publik pada aktivitas dan pengawasan kegiatan permodalan.
7. Perbaikan peningkatan sarana dan prasarana
8. Perbaikan pelayanan perizinan bagi penanaman modal secara sederhana, cepat, mudah, murah, dan memuaskan
9. Mengupayakan keamanan, kenyamanan, ketertiban lingkungan agar tercipta iklim yang ramah dan memuaskan. mendukung pemberian fasilitas untuk peningkatan sumberdaya masyarakat agar dapat menduduki jabatan strategis dan terjadi alih teknologi.

Sejak terbentuknya, Bupati dan aparatur Pemerintahan selangkah demi selangkah mulai melakukan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten membangun jalan di 6 lokasi dengan panjang bidang pengairan 10 lokasi yang terdapat di 5 kecamatan, hal ini

Berguna untuk berbagai sector. Sejumlah Pembtbn Indonesia dalam berbagai bidang untuk mendukung investasi asing yaitu:

1. Bidang Sarana dan Prasarana

Pemerintah Indonesiatelah berhasil membangun jalan negara 410 km. Bidang Irigasi telah dibangun 73 saluran irigasi dengan total luas lahan irigasi 8,740 ha, luas areal irigasi berfungsi 1,620 ha. Sementara untuk program pembangunan infrastruktur pada tahun 2008 yang akan datang Pemerintah telah merenruas jalan 930 km, sarana permukiman sepanjang 23 kmyaitu sarana air bersih pedesaan, drainase perkotaan 3 km.

2. Bidang Promosi

Disamping itu pemerintah Indonesia juga, mempromosikan daerahnya dalam berbagaievent-event baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat antar Pemda di Provinsi Sumatera Utara, seperti festival potensi daerah di Jakarta pada Tahun 2006, PROPENA Palembang dan Pekan Raya Sumatra untuk mempromosikan potensi yang dimiliki untuk diketahui oleh investor, agar datang dan menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Bidang Sumber Daya Manusia

Keadaan pembangunan tersebut merupakan wujud nyata dari pembangunan Indonesia. Disamping majunya pembangunan di Indonesia, Bupati telah melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang sudah terkenal di Indonesia seperti ITB (Bidang USU dan Unimed (Bidang Pendidmbentuk instansi yang menangani bidang investasi, yaitu dengan dibentuknya seksi penanaman modal dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, yang bertugas mengurus admistrasi perizinan penanaman

modal di Indonesia Teknik Tepat Guna), IPB (Bidang Pertanian), ikan), PHP II (Bidang Peralatan dan Kesehatan) untuk penyediaan SDM yang ahli uuntuk pembangunan di Indonesia.

4. Bidang Birokrasi

Pemerintahan dan Perizinan
Pemerintah Indonesia telah membangun perizinan, namun pada saat ini mereka masih melakukan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam situasi yang memungkinkan.

Kebijakan Investasi Asing pada Era Ir.H.Joko Widodo

Bagi kebanyakan orang, magnet kharisma Presiden Jokowi terletak pada gaya bicaranya yang sederhana namun tetap lugas dan mampu dipahami oleh berbagai kalangan. Bahkan ‘sihir’ Presiden Jokowi tersebut dinilai telah berhasil meningkatkan gairah para peserta dan pebisnis yang hadir pada pertemuan APEC beberapa waktu yang lalu, untuk berinvestasi di Indonesia. Buktinya, berdasarkan survey Price water house Coopers, 57% dari 635 CEO meyakini bahwa investasi di Indonesia akan menguat dalam satu tahun ke depan.

Investasi memang memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian suatu bangsa, sehingga sangat wajar bila terjadi persaingan antar negara dalam menarik investor. Indonesia punya faktor keberuntungan, selain merupakan negara yang menarik karena keragaman sumber daya dan besarnya

pasar domestik, Pemerintahan yang terdahulu setidaknya telah cukup berhasil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik di tengah ketidakstabilan yang melanda beberapa negara dunia. Oleh karenanya, tidak heran pula bila berbagai lembaga pemeringkat internasional (seperti S&P, Fitch Ratings, Mood's, R&I, dan JCRA) menempatkan Indonesia pada peringkat yang stabil sejak beberapa tahun lalu.

Akan tetapi, walaupun peran investasi asing masih dibutuhkan sebagai modal pembangunan, masuknya investasi asing tidak bisa dipandang dari sisi positifnya saja. Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan ke depan untuk mengoreksi timbal-balik hubungan investasi asing dalam pembangunan nasional.

Pertama, memperluas penciptaan lapangan kerja dari penanaman modal asing (PMA). Pada akhir 2013, nilai PMA yang masuk hampir mencapai Rp 800 Triliun, sedangkan PMDN tidak sampai Rp 400 Triliun. Namun pada tahun yang sama, PMA hanya mampu menyerap 800 ribu tenaga kerja, sementara PMDN menyerap hampir 600 ribu tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PMA menyerap tenaga kerja per satu triliun investasi yang ditanamkan lebih rendah dibandingkan dengan PMDN.

Kedua, mendorong investasi pada industri bahan baku dan antara sehingga mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan

penolong. Masuknya PMA terkadang tidak diiringi dengan ketersediaan bahan baku dan keberadaan industri hulu dan antara. Alhasil, masuknya PMA juga mendorong tumbuhnya impor bahan baku dan penolong. Tidak heran jika ketergantungan terhadap impor bahan baku dan penolong menjadi tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata 67% dari total impor Indonesia adalah impor bahan baku dan penolong. Terlebih lagi, depresiasi nilai tukar rupiah akhir-akhir ini semakin merugikan badan usaha yang mengandalkan pasokan bahan baku dan penolong impor, namun berorientasi pada pasar domestik.

Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Masuknya PMA sering diikuti dengan masuknya tenaga kerja asing, baik yang bekerja kurang maupun yang lebih dari satu tahun. Pada satu sisi memang hal ini berdampak positif, sehingga tenaga kerja domestik dapat menggali ilmu maupun etika kerja dari tenaga kerja asing. Namun tren peningkatan masuknya tenaga kerja profesional asing ini berpotensi mendongkrak kompensasi tenaga kerja dan neraca transfer berjalan. Sejak tahun 2005 hingga 2013, jumlah tenaga kerja dan remitansi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia telah tumbuh, berturut-turut 13% dan 27% per tahun, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah dan remitansi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Keempat dan yang paling penting untuk dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi adalah memecahkan persoalan melebar

defisit transaksi berjalan (current account) yang sudah semakin akut, dengan menekan capital outflow pada komponen pendapatan investasi. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang mendorong reinvestasi PMA, pemanfaatan peluang ekspor pasar dunia, pendalaman sektor keuangan, insentif penanaman modal kembali, maupun instrument regulasi lainnya.

Rilis data Neraca Pembayaran Indonesia oleh BI pada bulan ini menunjukkan bahwa 80% dari defisit transaksi berjalan (sebesar US\$ 9,1 Milliar) disumbangkan oleh defisit pada neraca pendapatan primer, dan 77%-nya (US\$ 6,9 Milliar) disumbangkan oleh defisit pada neraca pendapatan investasi. Besarnya defisit pada neraca pendapatan investasi ini mencerminkan pendapatan investasi lebih banyak diperoleh oleh orang asing yang menyediakan modal finansialnya kepada penduduk Indonesia.

Memang betul terjadi peningkatan keuntungan pada perusahaan PMA dan masuknya dana asing memang diikuti dengan risiko dana keluar, apalagi Indonesia adalah negara yang menganut regulasi devisa bebas. Akan tetapi, persoalan 'lama' ini tidak bisa didiamkan terus menerus, terlebih ruang gerak pemain asing akan semakin melebar dengan direvisinya Daftar Negatif Investasi (DNI). Meskipun persoalan ini tidak mudah diselesaikan, namun pemerintah kedepan tetap harus berupaya menekan defisit neraca pendapatan primer. Semakin lama didiamkan, semakin lebar jarak defisit

transaksi berjalan, semakin tidak sehat perekonomian nasional.⁸

Simpulan

Dari uraian yang telah disajikan maka, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. MEA/AEC 2015 ini bukan hanya sekedar tempat bertemunya semua negara ASEAN tapi sebagai ajang Pertandingan Ekonomi dan Kesiapan Tuan Rumah dalam menghadapinya.
2. AEC/MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan pada tahun 2015 ini. Dengan pencapaian ini maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dinama terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Mewujudkan ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas dapat memberikan manfaat bagi seluruh Negara ASEAN.
3. Perkembangan investasi asing Indonesia belum berkembang secara signifikan walaupun sejumlah potensi yang ada sudah mulai dilirik oleh investor asing, terutama dalam bidang Perkebunan dan Pertambangan. Peranan investasi bagi daerah Indonesia secara riil belumlah ada.

⁸<http://www.coreindonesia.org/view/100/tantangan-investasi-asing-di-era-jokowi.html>

4. Kebijakan merealisasikan investasi asing adalah dengan membentuk lembaga teknis yang menangani investasi asing, melakukan promosi mengenai potensi yang dimiliki sehingga mampu memanfaatkan posisi tawaran yang sangat besar.
5. Kolaborasi yang tepat antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan social(hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing perusahaan diIndonesia..

Saran.

Ahkirnya penulis juga melahirkan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan berbagai potensi yang ada Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai usaha-usaha untuk mempercepat realisasi berbagai usaha Daerah. Pemerintah segera membenahi sejumlah infrastruktur yang rusak terutama jalan raya terutama jalan yang masih rusak, serta sarana pendukung lainnya. yang telah dilirik oleh investasi asing terutama dalam Pertambangan dan Perkebunan, yang akan mempercepat pembangunan dan menambah sumber pendapatan.
2. Pemerintah di harapkan untuk menyediakan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses dan terbuka agar para pelaku usaha/investor asing

yang ingin berinvestasi dapat dengan mudah melirik indonesia sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi tanpa ada rasa takut, dan untuk berbagai skala kecil maupunn skala besar agar terciptanya aliran arus balik usaha yang kondusif dan dapat mengurangi rasa ketakutan pada investor asing untuk menanamkan modalnyadi Indonesia.

3. Pemerintah Indonesia segera merealisasikan pembuatan peraturan daerah tentang investasi secara jelas yang mengakomodir kepentingan masyarakat dan investor.
4. Permasalahan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari permasalahan politik. Setiap kebijakan ekonomi tidak bisa yang berasal dari aktifitas politik sangat berpengaruh oleh ideologi apa yang dianut oleh suatu Negara. Untuk konteks Indonesia, sangat wajar kalau kebijakan kita seakan-akan disetir oleh kepentingan asing .

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Gilpin, Robert dan Millis Jean Gilpin, *Tantangan kapitalisme Global*, Dikutip dalam Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme baru, Peran negara dalam pembagunan*, (Yogyakarta: Tajidu Press, 2005),.

Yuniarti, *Peran Negara dalam Industrialisasi di Malaysia dan Singapura 1970-2000*, tesis S2 (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana FISIPOL HI UGM, 2007),

- Sholeh. 2013. *Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol 1 No. 2
- Anggraeni, Yermia, *Kesiapan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN*, Program Sarjana (Salatiga: UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA), 2014. Fakultas Ekonomia dan Bisnis,
- Buku:
- Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, UII Press.
- Erma Wahyuni, Syaiful Bahri dan Hesel Nogi S Tangklisan. 2006. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Jakarta. YPAPI.
- Holsti, KJ. Dalam Umar Suryadi Bakry, 1999, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta: Jayabaya University Press,
- Romy Librayanto, *ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Makasar: Pustaka Refleksi,
- Sentosa Sembiring. 2007. *Hukum Investasi*. Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- Arifin, Syamsul, Rial A. Djaafara, Aida S. Budiman. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990
- _____, *Liberalisme dalam Ekonomi Politik Internasional, Pada Topik :Perdagangan dalam perspektif Ekonomi Politik internasional*. (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana FISIPOL HI UGM, 2007),
- _____, *Memahami Investasi Langsung Luar Negeri*, Handout kuliah Investasi dan Perdagangan, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana FISIPOL HI UGM, 2007)
- Salim. H.S dan Budi Sutrisno. 2007. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,
- Sufri Yusuf, 1989, *Hubungan Internasional & Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Bustami, Gusmardi, "Menuju ASEAN Economic Community", Departemen Perdagangan, Jakarta,
- Morgenthau, dalam Mohtar Mas'ood, 1990 *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan dan Metodologi*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES,
- Holsti, KJ. Dalam Umar Suryadi Bakry, 1999, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta: Jayabaya University Press,
- Stephan Haggard, *Politik industrialisasi di Korea selatan dan Taiwan*, dalam Budi winarno, Ibid., Pasal 1 Angka 1 UUPM No.25 Tahun 2007
- Website :
- Tulus Tambunan, *Daya Saing Indonesia Dalam Menarik Investasi Asing*, (dipaparkan pada seminar Bank Indonesia, 2007) sumber: <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2495-06022008.pdf>, ASEAN.Economic.Community<[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37384/3Chapter II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37384/3Chapter%20II.pdf) (diakses 15 Agustus 2015)
- Nasril bahar, *Pemda Harus Benahi Iklim Investasi Daerah*. Sumber: <http://www.nasrilbahar.wordpress.com/page/2/-63k> Departemen Perdagangan. Menuju ASEAN Economic Community 2015.
- http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku

ECONOMIC Menuju ASEAN
(diakses 20 COMMUNITY 2015.pdf
Agustus 2015)

Departmen Perdagangan
RI.2015--.Menuju Asean Economic
Community.

Rian, Nugroho. 2012.
Public Policy. Jakarta: Gramedia.

[http://www.weforum.org
/.reports/global-competitiveness
report 2013-2014](http://www.weforum.org/.reports/global-competitiveness-report-2013-2014). The Global
Competitiveness Report 2013-
2014//World Economic Forum
2013